

Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah

The Implementation of the Independent Curriculum in Madrasah

Yasni Alami & Dudun Najmudin

STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

alamiyasni@gmail.com & dudunnajmudin1989@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami tentang bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di madrasah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian pustaka atau studi kepustakaan, oleh karena itu sifat penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Data yang dikumpulkan seluruhnya berasal dari literatur maupun bahan dokumentasi lain, seperti buku, jurnal, maupun media lain yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yang merupakan langkah-langkah dalam rangka representasi obyektif tentang realitas yang terdapat di dalam masalah yang diteliti. Berdasarkan kajian bahwa madrasah dengan seiringnya waktu mengikuti kurikulum Merdeka, walaupun secara bertahap dimulai pada tahun Pelajaran 2022/2023 berdasarkan perjenjang.

Kata Kunci : Implementasi, Kurikulum Merdeka & Madrasah

Abstract

This study aims to explore how the implementation of merdeka curriculum in madrasah. The research method is literature review or literature study, therefore the nature of the research is library research.. The data collected from literature and other documentary materials, such as books, journals, and other relevant media. Data analysis techniques are carried out using descriptive methods which are steps in the framework of an objective representation of the reality contained in the problem under study. Based on the study that madrasah over time follow the merdeka curriculum, although gradually starting in the 2022/2023 academic year based on levels.

Keywords: Implementation, Madrasah & Merdeka Curriculum

I. PENDAHULUAN

Fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional tak lain adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Seiring dengan perkembangan zaman serta

masyarakat yang semakin dinamis, sistem pendidikan pun ikut mengalami transformasi demi penyesuaian terhadap globalisasi yang terjadi (Manula, 2022).

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan telah mengalami pergantian kurikulum sebanyak sebelas kali, di mulai pada tahun 1947, dengan kurikulum yang sangat sederhana kemudian sampai terakhir adalah kurikulum 2013. Meskipun berganti-ganti kurikulum tidak lain tujuannya adalah perbaikan terhadap kurikulum sebelumnya (Kh & Siddiq, 2023). Setiap perubahan yang terjadi merupakan kebijakan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menangani pendidikan di Indonesia, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perubahan kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, adalah suatu proses pembelajaran yang panjang sehingga pemerintah memberikan kesempatan kepada pendidik dan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing dari sekolah/satuan pendidikan

(Kemendikbud, 2022; Fauzi, 2022a).

Implementasi Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya dijalankan oleh semua sekolah maupun madrasah. Hal ini dikarenakan kebijakan Kemendikbudristek yang masih memberikan kelonggaran kepada satuan pendidikan dalam melakukan implementasi kurikulum (Kemendikbud, 2022). Implementasi Kurikulum Merdeka yang ditawarkan disesuaikan dengan kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan secara mandiri dengan tiga alternatif pilihan. Pertama pilihan Mandiri Belajar, kedua pilihan Mandiri Berubah dan ketiga Mandiri Berbagi (Andari, 2022).

Penerapan Kurikulum Merdeka harus didukung dengan pelaksanaan pelatihan, penyediaan sumber bahan belajar guru dan perangkat ajar yang inovatif dan kreatif. Dalam hal ini, implementasi kurikulum merdeka diharapkan mampu merubah pendidikan kepada hal yang lebih baik, setidaknya ada tiga elemen yang harus sejalan, pertama pemangku kebijakan dalam hal ini dinas/satuan pendidikan terkait

yang ada di lingkungan, kedua akademisi, dan yang ketiga yang menjalankan dalam hal ini sekolah-sekolah (Manula, 2022).

Kurikulum Merdeka menjadi acuan bagi madrasah memilih nilai-nilai karakter/moral/akhhlak yang akan dikembangkan, ditanamkan, dan dibentuk bagi peserta didik. Nilai-nilai agama Islam merupakan ruh madrasah yang menjadi warna tersendiri dalam implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di madrasah. Ruh Kurikulum Merdeka harus menjadi spirit bagi madrasah untuk meningkatkan kualitas, menumbuhkan keberanian berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, agar mampu bersaing dengan satuan pendidikan secara nasional maupun internasional. Perlu ditekankan kembali bahwa pelaksanaan IKM di madrasah harus terintegrasi dengan nilai-nilai agama Islam.

Pelaksanaan IKM terintegrasi dengan nilai-nilai agama Islam diharapkan mampu membentuk karakter/moral/akhhlak bercirikan nilai-nilai religius (keislaman) peserta didik. Karakter/moral/akhhlak dapat tecermin dalam cara berpikir, bertindak, bersikap, berinovasi, berkreasi, dan memiliki

kompetensi abad-21, serta keterampilan hidup sebagai hasil pendidikan dan pembelajaran di madrasah. IKM telah diberlakukan oleh Kemendikbudristek mulai pada tahun pelajaran 2022/2023 secara bertahap. Secara otomatis Kemenag juga mengikutinya dengan mengatur IKM pada mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab. Sedangkan, IKM untuk mata pelajaran Umum di madrasah mengikuti aturan yang ditetapkan Kemendikbudristek.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003).

Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya : Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari

lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjung langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2003).

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi adalah usaha dalam menerapkan suatu hal. Implementasi merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan ketika perencanaan sudah

sempurna yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang terencana (Usanto, 2022).

Adapun tujuan dari implementasi penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui program kampus mengajar perintis di sekolah dasar yaitu membantu menyelesaikan problematika di persekolahan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Bentuk kegiatannya berupa membimbing peserta didik dan memberdayakan peralatan sekolah dalam rangka proses belajar mengajar (Maghfiroh & Sholeh, 2022).

Kurikulum Merdeka bisa saja terus dilakukan dengan beberapa syarat. Pertama, regulasi yang fundamental, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedua, melihat dari asesmen nasional yang bertujuan untuk mengukur bagaimana penalaran dari peserta didik bukan hanya pengetahuan saja. Ketiga, jika publikasi semakin menyebar luas maka kemungkinan kecil Kurikulum Merdeka dihentikan (Anas et al., 2023).

Jadi, implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan

untuk menjawab keluhan dan masalah yang terjadi pada kurikulum sebelumnya. Implementasi Kurikulum Merdeka dapat dilihat di sekolah penggerak. Implementasi kurikulum ini menekankan pada bakat dan minat peserta didik dalam mengembangkan potensi yang mereka punya. Implementasi kurikulum ini dapat menjadikan peserta didik berkompeten sesuai bidangnya, serta dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa sekarang.

Implementasi diartikan sebagai suatu tindakan dari suatu perencanaan yang sudah disusun dengan matang dan terperinci. Implementasi dilakukan ketika perencanaan sudah sempurna yang berlanjut pada aksi- vitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang sesuai perencanaan. Implementasi tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan yang lain (Susiani, 2022).

Misalnya sumber daya manusia, alam, sarana, prasarana, dan pendanaan. Kaitannya dengan implementasi MBKM di lingkungan perguruan tinggi ataupun sekolah tingkat dasar dan

menengah tentu dipengaruhi oleh kurikulum, kelas, peserta didik, guru, mahasiswa, dosen, hingga pendanaan yang tidak murah (Anggreini & Priyoadmiko, 2022).

Implementasi dari Kurikulum Merdeka Belajar jika dijalankan sesuai fungsinya pasti akan berjalan dengan baik. Kurikulum ini juga sangat membantu menyelesaikan problematika sekolah selama masa Covid-19. Pada masa itu pembelajaran dilakukan dari rumah secara online (Hasim, 2020).

Pembelajaran menggunakan kurikulum lama dengan metode lama tentu tidak akan efektif dan tidak efisien lagi. Selain menjadikan peserta didik tidak memahami secara keseluruhan tentang pembelajaran, guru pun juga bingung bagaimana cara membuat peserta didik mengerti dengan materi ajar (Manrulu, 2015).

Konsep merdeka belajar merupakan konsep yang memberikan kemerdekaan dalam belajar untuk mengusahakan kesiapan lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta agar mampu menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat.

Terdapat delapan program MBKM yang direncanakan. Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi swasta di antaranya program pertukaran pelajar antar prodi maupun antarperguruan tinggi di dalam perguruan tinggi maupun luar perguruan tinggi (Desy Aulia, Nurul Hasanah, 2022).

Dalam penerapan Kurikulum Merdeka terdapat intrakurikuler serta penguatan profil pancasila dan ekstrakurikuler. Penerapan Kurikulum Merdeka dengan mengalokasikan waktu akan dirancang hingga satu tahun serta dilengkapi dengan alokasi jam pelajaran yang disampaikan setiap minggunya. Merdeka belajar merupakan langkah awal yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 guna mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia (Suryaman, 2020).

Kurikulum pendidikan yang digunakan juga menyesuaikan dan mengadaptasi dari kebijakan dari kebijakan merdeka belajar. Guru memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia, yang dapat menggerakkan perubahan nyata, tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri namun juga

berdampak pada peserta didik dan juga lingkungan disekitarnya. Dengan adanya peran tersebut mempermudah pelaksanaan kurikulum merdeka belajar (Andari, 2022).

Hal yang paling utama dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar yakni dengan mengetahui terlebih dahulu visi dari merdeka belajar. Visi dari merdeka belajar adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila (Kh & Siddiq, 2023).

Terdapat 6 profil pelajar pancasila yang harus diketahui dalam kurikulum merdeka belajar yakni (1) beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia (2) mandiri (3) bernalar kritis (4) berkebhinekaan global (5) bergotong royong (6) kreatif (Anggraini et al., 2022).

Dalam menimplementasikan kurikulum merdeka belajar dalam suatu lembaga pendidikan diperlukan kebebasan suatu pendidikan untuk mengisi (*fleksibel*), tidak mengacu pada perangkat, serta kesiapan SDM

harus diperhatikan diantaranya yakni harus memprogra kegiatan pembelajaran terlebih dahulu dan guru harus menjadi agen pembawa (human touch / tatap muka dan technology touch / pengumpulan tugas) (Usanto, 2022).

Kegiatan pembelajaran baik praktik maupun proyek merupakan hasil dari kesepakatan kelas yang harus ada output, tata tertib maupun konsekuensi serta kesepakatan sekolah yang meliputi orang tua muris, komite, dan pendidik untuk memperlancar kegiatan pembelajaran

B. Hakikat Implementasi Kurikulum

Pada hakikatnya, kurikulum didesain untuk menghasilkan perubahan kualitas pembelajaran peserta didik agar sesuatu tujuan pendidikan. Implementasi kurikulum diartikan sebagai proses perubahan untuk memperoleh hasil yang mendekati pencapaian tujuan pendidikan ideal. Berdasarkan hal tersebut, semua kerja kurikulum sejak dari rancangan, implementasi, dan evaluasi merupakan siklus perubahan (Daga, 2021).

Terdapat lima pedoman

pokok agar implementasi kurikulum dapat terlaksana dengan baik, yaitu sebagai berikut (Suryaman, 2020):

1. Perubahan untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik harus benar secara teknis dan ilmiah. Misalnya, perubahan tersebut berdasar- kan hasil riset tentang perubahan apa yang akan berhasil dan apa yang tidak akan berhasil.
2. Inovasi kurikulum yang sukses mengharuskan perubahan struktur sekolah tradisional.
3. Perubahan harus bisa dikelola dan dilaksanakan sebagian besar guru.
4. Implementasi perubahan yang sukses harus bersifat organik daripada birokratik melalui pendekatan adaptif dengan mempertimbangkan masalah besar yang dihadapi sekolah dan kondisi sekolah.
5. Kurikulum perlu fokus pada upaya, waktu, dan dana yang memadai dengan kegiatan yang jelas, konten yang rasional, dan pelaksanaan yang tepat sasaran.

C. Tahap Implementasi Kurikulum

Dalam pelaksanaanya, terdapat tahapan yang harus dilakukan dalam implementasi

pengembangan kurikulum. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam implementasi pengembangan Kurikulum Merdeka (Aji & Putra, 2021).

1. **Orientasi/kebutuhan**

Fase yang berisikan kesadaran atas kebutuhan (needs phase) untuk melakukan perbaikan masalah pendidikan di sekolah. Kaitannya dengan implementasi pengembangan kurikulum yang ada adalah warga sekolah harus sadar akan pentingnya pengembangan kurikulum yang ada.

2. **Inisiasi**

Inisiasi merupakan langkah permulaan pelaksanaan perubahan yang berasal dari luar sekolah atau dari dalam sekolah. Inisiasi bisa dilakukan juga oleh sekolah sebagai masyarakat belajar bagi pendalaman pemahaman warga sekolah atas berbagai hal yang harus dipahami dan dilakukan sesuai ide inovasi.

3. **Implementasi**

Implementasi merupakan perubahan yang diadopsi sekolah sebagai kebijaksanaan sekolah. Pengembangan kurikulum lebih baik apabila diadopsi dari kebijakan sekolah terkait.

4. **Institusionalisasi atau keberlanjutan**

Ketika perubahan dilanjutkan, fase ini hanya bisa terlaksana dengan baik melalui keberlanjutan komitmen, komunikasi, kerja sama, dan respek antarwarga sekolah. Sejalan dengan hal tersebut, keberlanjutan dari pengembangan kurikulum yang diajukan juga bergantung pada hal di atas. Pengembangan kurikulum yang ada harus dijaga sehingga program tersebut dapat berjalan dengan secara terus-menerus. Keberlanjutan juga merupakan kunci utama dalam berhasil atau tidaknya kurikulum yang diusulkan. Hal tersebut menjadi lebih masuk akal, mengingat perkembangan kurikulum yang sering terjadi pada dunia pendidikan yang ada di Indonesia (Sumarsih et al., 2022).

5. **Pemeliharaan**

Fase ini bisa diperkuat atau diperlemah, tergantung komitmen staf atas keberlanjutan implementasi kurikulum. Keberlangsungan pengembangan kurikulum ditentukan dengan pemeliharaan yang dilakukan. Dalam praktiknya, pemeliharaan ini dapat dilakukan dalam pengawasan yang baik terhadap

implementasi pengembangan kurikulum yang dilaksanakan (Hilmin et al., 2022).

Kurikulum Merdeka saat ini tidak diinstruksikan untuk dilaksanakan dalam skala nasional. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Kemendikbud-ristek yang memberikan keleluasaan pada satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum. Di samping program Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), terdapat beberapa program yang dibuat untuk mendukung program IKM. Program tersebut adalah Sekolah Penggerak (SP) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK) (Oksari et al., 2022).

Dalam program tersebut, Kemendikbudristek memberikan dukungan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Dari dua kegiatan tersebut didapatkan pengalaman yang baik dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sehingga menjadi praktik baik. Konten pembelajaran dari IKM pada SP/SMK-PK teridentifikasi dengan baik dan dapat menjadi pembelajaran bagi satuan pendidikan lainnya (Aprima & Sari, 2022).

Penyediaan dukungan IKM

yang diberikan oleh Kemendikbudristek adalah bagaimana kemendikbudristek memberikan dukungan pembelajaran IKM secara mandiri dan dukungan pendataan IKM jalur mandiri. Dari dukungan tersebut akan mendapatkan calon satuan pendidikan yang terdata berminat dan akan memperoleh pendampingan pembelajaran untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri. Guru, kepala sekolah, pengawas, dan aktor lain dapat mengadakan kegiatan berbagai praktik Kurikulum Merdeka dalam bentuk seminar maupun lokakarya secara mandiri (Aritonang & Armanto, 2022).

Terdapat pergeseran peran guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Guru pada kurikulum ini lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dari peserta didiknya. Peserta didik juga diberikan tugas lebih dalam pembelajaran, yaitu sebagai center of learning. Dalam artian lain, peserta didik berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Hal ini secara tidak langsung juga akan menjadikan kelas lebih hidup dan menjadikan peserta didik lebih aktif (Fauzi, 2022b).

Meskipun demikian, sebelum menuju pengembangan Kurikulum Merdeka, masih banyak dari tenaga pendidik yang belum mendapat kebebasan dalam merancang arah pembelajaran di kelas. Pembelajaran tersebut masih terpaku pada buku teks. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan batasan bagi peserta didik dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun tidak dapat dipungkiri, buku teks juga dapat dijadikan acuan dalam proses belajar mengajar selama ini (Pendidikan et al., 2020).

D. Pengertian Kurikulum Merdeka Belajar

Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju Nadiem A Karim (Koroh et al., 2022).

Esensi kemerdekaan berfikir menurut Bapak Menteri harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Menurut Bapak Nadiem menyebutkan dalam

kompetensi guru level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran terjadi. Sistem pengajaran akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas dapat berdiskusi menjadi di luar kelas pada tahun yang akan datang (Barao et al., 2022).

Murid dapat berdiskusi lebih dengan guru sehingga nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, belajar dengan *outing class*, dan tidak hanya guru saja yang menjelaskan, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja (Ida Bagus Nyoman Mantra¹), I Gde Putu Agus Pramerta²) & Kadek Rahayu Puspadewi⁴), 2016).

Sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing, sehingga akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Nadiem A Karim membuat kebijakan

merdeka belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, *penelitian Programme for Internasional Student Assesment (PISA)* tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke 74 dari 79 Negara. Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan kurvei karakter (Hasim, 2020).

Literasi bukan hanya mengukur kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep dibaliknya. Untuk kemampuan numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata.

Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem A Karim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para dinas pendidikan provinsi,

kabupaten/kota seindonesia, Jakarta pada 11 Desember 2019. Ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu:

1. Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Assesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Assesment ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya (Arviansyah & Shagena, 2022).
2. Ujian Sekolah Bersatandar Nasional (USBN) akan diserahkan kepada sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberi keleluasan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.
3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP cukup dibuat satu lembar saja, menurut Nadiem A Karim. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan

untuk kegiatan pembelajaran dan pemingkatan kompetensi.

4. Dalam penerimaan peserta didik baru (PBDB), sistem zonasi diperluas (tidaktermasuk daerah 3T). bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi,diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini (Anggraini et al., 2022).

E. Dasar Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Dasar pelaksanaan Kurikulum Merdeka mengacu pada Keputusan Menristek Dikti No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Surat Keputusan Menteri ini menetapkan 16 keputusan, yaitu sebagai berikut (Susiani, 2022)

1. Satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

2. Pengembangan kurikulum mengacu pada Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 yang disederhanakan/revisi, dan Kurikulum Merdeka.
3. Kurikulum mengacu pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
4. Kurikulum 2013 dilaksanakan sesuai perundang-undangan.
5. Kurikulum 2013 yang disederhanakan ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.
6. Kurikulum Merdeka diatur di lampiran SK Mendikbudristek.
7. Pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat dalam implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang disederhanakan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat dalam implementasi Kurikulum Merdeka diatur di lampiran II S K ini.
9. Peserta program sekolah penggerak dan program SMK Pusat Keunggulan

- menggunakan Kurikulum Merdeka serta pemenuhan beban kerja dan linieritas sesuai kedua lampiran SK ini.
10. Kurikulum 2013 yang disederhanakan dapat diberlakukan mulai kelas I sampai kelas XII.
 11. Kurikulum Merdeka dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut.
 12. Tahun ke-1: Umur 5 & 6 tahun (kelas 1, 4, 7, dan 10).
 13. Tahun ke-2: Umur 4–6 tahun (kelas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11).
 14. Tahun ke-3: Umur 3–6 tahun (kelas 1–12).
 15. Pelaksanaan kurikulum menggunakan buku teks utama yang ditetapkan oleh Pusat Perbukuan.
 16. Kurikulum Merdeka mulai berlaku pada tahun ajaran 2022/2023.
 17. Keputusan ini mencabut 2 aturan berikut (Kepmendikbud ristek Nomor 56 Tahun 2022; Aji & Putra, 2021):
 - a. SK Mendikbud Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada suatu

Pendidikan dalam kondisi khusus.

- b. Ketentuan kurikulum serta beban kerja dan linieritas pada program sekolah penggerak dan program SMK Pusat Keunggulan.

F. Tujuan Kurikulum Merdeka

Pada masa Covid-19, pendidikan di Indonesia menjadi terbelakang dan ketinggalan. Kebijakan Kurikulum Merdeka menjadi solusi terhadap ketinggalan pendidikan di Indonesia. Tujuan dari Kurikulum Merdeka adalah untuk menjawab permasalahan pendidikan terdahulu. Adanya kurikulum ini akan mengarahkan dalam mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini berfungsi untuk mengembangkan potensi, salah satunya proses pembelajaran yang dirancang dengan relevan dan interaktif (Susiani, 2022).

Pembelajaran yang interaktif salah satunya dengan membuat proyek. Pembelajaran tersebut akan membuat peserta didik lebih tertarik dan bisa mengembangkan isu-isu yang berkembang di lingkungan (Manula, 2022).

G. Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka Belajar

Suatu program pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam setiap proses pelaksanaannya. Pada pembahasan ini akan dijabarkan kelebihan dan kekurangan dari program kurikulum merdeka belajar.

Hasil dari studi literatur menyebutkan bahwa kelebihan kurikulum merdeka belajar yaitu (1) menjadikan dunia pendidikan lebih fleksibel, yang artinya melepas belenggu dunia Pendidikan agar lebih mudah bergerak (2) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendalami pelajaran yang diambil sesuai kebutuhan (3) memberikan wadah untuk para peserta didik mengeksplor pengetahuan umum dengan terjun ke masyarakat (4) peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia pekerjaan (Anas et al., 2023).

Kemudian kekurangan kurikulum merdeka belajar yakni (1) persiapan yang dilakukan harus dimatangkan terlebih dahulu baru dilaksanakan, itu membutuhkan pelatihan yang jangka waktunya cukup lama (2) Perencanaan

pendidikan dan pengajaran belum tersusun dengan baik untuk saat ini (3) SDM dalam menjalankan program kurikulum merdeka belajar harus dibekali dengan pelatihan yang memerlukan anggaran lebih (Zulaiha et al., 2022).

H. Kurikulum Merdeka di Madrasah

Kurikulum Merdeka diharapkan mampu mengembalikan *learning loss* yang terjadi pada masa Covid-19. *Learning loss* adalah terjadinya penurunan pengetahuan dan keterampilan peserta didik secara akademis akibat berlangsungnya pembelajaran di rumah dalam waktu yang cukup lama. Penurunan akademik dan keterampilan tersebut diikuti pula dengan penurunan karakter/moral (adab), kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi peserta didik. Sebagaimana kita ketahui bahwa muatan mata pelajaran pada kurikulum pendidikan di madrasah terbagi menjadi dua; rumpun mata pelajaran umum dan rumpun mata pelajaran PAI ditambah Bahasa Arab. Urgensi IKM di sekolah atau madrasah salah satunya adalah untuk memulihkan pembelajaran

yang terhenti karena pandemi Covid-19 (Anas et al., 2023).

Terhentinya pembelajaran berakibat menurunnya minat belajar dan karakter/moral/akhlak peserta didik. Kemendikbudristek dan Kemenag sebagai wakil pemerintah berupaya menumbuhkan karakter peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui IKM. Dalam panduan IKM di madrasah dikemukakan bahwa secara bertahap IKM akan dilakukan di madrasah dimulai pada tahun Pelajaran 2022/2023. (Anas et al., 2023) Dijelaskan pula bahwa madrasah dapat memilih dua opsi dalam IKM yaitu, pertama, madrasah masih menggunakan Kurikulum 2013, dengan menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka. Dan kedua, madrasah melaksanakan IKM secara penuh Madrasah yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Kurikulum Merdeka melaksanakan tahapan-tahapan. Pertama, tahun pertama, Kurikulum Merdeka diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Meliputi jenjang RA, MI, MTs, MA, dan MAK secara terbatas pada madrasah *piloting*. IKM untuk kelompok peserta didik jenjang

usia 4 sampai 5 tahun pada jenjang RA, kelas 1 dan 4 pada jenjang MI, kelas 7 jenjang MTs, dan kelas 10 pada jenjang MA dan MAK. (Langke, 2021)

Sementara itu, untuk peserta didik pada jenjang MI kelas 2, 3, 5, dan 6, MTs kelas 8 dan 9, serta MA dan MAK kelas 11 dan 12 masih menggunakan Kurikulum 2013. Kedua, tahun kedua, Kurikulum Merdeka pada jenjang RA diimplementasikan pada peserta didik usia 4 sampai 6 tahun, jenjang MI kelas 1, 2, 4, dan 5, jenjang MTs kelas 7 dan 8, dan jenjang MA dan MAK kelas 10 dan 11. Sedangkan peserta didik kelas 3, 6, 9, dan 12 masih menggunakan Kurikulum 2013. Ketiga, tahun ketiga, Kurikulum Merdeka sudah diimplementasikan pada semua satuan pendidikan madrasah baik dasar maupun menengah untuk semua tingkatan kelas. Pelaksanaan IKM pada jenjang MI untuk peserta didik kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, pada jenjang MTs untuk peserta didik kelas 7, 8, 9, dan pada jenjang MA/MAK untuk peserta didik kelas 10, 11, 12. Artinya, mulai tahun pelajaran 2024/2025 semua satuan pendidikan madrasah (RA, MI, MTs, dan MA/MAK) hanya mengimplementasikan Kurikulum

Merdeka atau tidak melaksanakan dua kurikulum. (Langke, 2021)

IV. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum merdeka didesain sedemikian rupa agar Pendidikan terus berkembang sehingga mampu mengikuti perkembangan dan tantangan jaman. Implementasi kurikulum merdeka diharapkan mampu mengembalikan *learning loss*

terutama di madrasah, implementasi kurikulum merdeka di madrasah secara bertahap dari setiap jenjang, mulai dari jenjang RA, MI, MTs dan MA. Karena di madrasah bisa memilih dua opsi dalam melaksanakan kurikulum. Pertama bisa melaksanakan kurikulum 2013, dengan prinsip kurikulum Merdeka atau sepenuhnya melaksanakan kurikulum Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. H. S., & Putra, M. H. I. (2021). Role Model Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Program Studi Non-Agama. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(6), 2001–2010. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23821>
- Anas, Ibad, A. Z., Anam, N. K. A., & Hariwahyuni, F. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (Mi). *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(1).
- Andari, E. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Menggunakan Learning Management System (LMS). *Allimna: Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 1(2), 65–79. <https://doi.org/10.30762/allimna.v1i2.694>
- Anggraini, D. L., Yulianti, M., Faizah, S. N., Belawati, A. P., Guru, P., & Ibtidaiyah, M. (2022). *Peran guru dalam mengembangkan kurikulum merdeka*. 1(3).
- Anggreini, D., & Priyojadmiko, E. (2022). Peran Guru dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Merdeka Belajar untuk Meningkatkan Pembelajaran Matematika pada Era Omricon dan Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2022*, 75–87.
- Aprima, D., & Sari, S. (2022). Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan Analisis Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pelajaran Matematika SD. *Cendikia : Media*

- Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 13(1), 95–101.
- Aritonang, I. B., & Armanto, D. (2022). Peran Guru Dalam Merdeka Belajar Untuk Meningkatkan Pembelajaran Matematika Siswa di Era Pandemic Covid-19. *Prosiding Pendidikan Dasar*, 1, 302–311. <https://doi.org/10.34007/ppd.v1i1.202>
- Arviansyah, M. R., & Shagena, A. (2022). 1803-Article_Text-5370-1-10-20220705. *Efektivitas Dan Peran Dari Guru Dalam Kurikulum Merdeka Belajar*, 17(1), 40–50.
- Barao, V.A.R., R.C.Coata., J.A.Shibli, M.Bertolini, & J.G.S.Souza. (2022). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1075–1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>
- Desy Aulia, Nurul Hasanah, S. N. A. (2022). Penerapan Kurikulum Merdeka di SMP. *Manajemen Administrasi Sekolah-AKWF2305*, 1(1), 67–78.
- Fauzi, A. (2022a). Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak. *Pahlawan: Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 18(2), 18–22. <https://doi.org/10.57216/pah.v18i2.480>
- Fauzi, A. (2022b). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (Studi Kasus Pada SMAN 1 Pengaron Kabupaten Banjar). *Jurnal Pahlawan*, 18(2), 18–22.
- Hasim, E. (2020). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo “Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Penulisan Karya Ilmiah Menuju Anak Merdeka Belajar,”* 68–74.
- Hilmin, H., Noviani, D., & Nafisah, A. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 148–162. <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/Khatulistiwa/article/view/565>
- Ida Bagus Nyoman Mantra1), I Gde Putu Agus Pramerta2), A. A. P. A., & Kadek Rahayu Puspawati4), I. A. M. W. (2016). Persepsi Guru Terhadap Pentingnya Pelatihan Pengembangan Dan Pelaksanaan Kurikulum

- Merdeka. *Https://Medium.Com/*, 3(5), 6313–6318.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Kemendikbud. 2022. Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kh, U. I. N., & Siddiq, A. (2023). *Impresi Kurikulum Merdeka Belajar Terhadap Pembelajaran SD / MI*. 8(1), 1–12.
- Koroh, L. I. D., Lao, H. A. E., Tari, E., & Liufeto, M. C. (2022). Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Di Smp Muhammadiyah Ende. *Jurnal Nauli*, 2(1), 10–16. <https://doi.org/10.1234/jurnal>
- Langke, R. (2021). Implementasi merdeka belajar di Madrasah. *Journal of Islamic Education Leadership*, 1(2), 125–135.
- Maghfiroh, N., & Sholeh, M. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Menghadapi Era Disrupsi Dan Era Society 5.0. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(05), 1185–1196.
- Manrulu, R. H. (2015). *Model Pembelajaran Kooperatif Menuju Pembelajaran Kontekstual*. 06(1).
- Manula, J. (2022). Program Pendidikan Guru Penggerak: Pijakan Kurikulum Merdeka Sebagai Implementasi Merdeka Belajar. *Jurnal Pengajaran Dan Riset*, 02(01), 34–43.
<http://103.138.15.157/index.php/pendar/article/view/20>
- Oksari, A. A., Nurhayati, L., Susanty, D., Paramita, G. A., & Wardhani, K. (2022). *Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Biologi Universitas Nusa Bangsa*. 5(1), 78–85.
- Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248–8258.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3216>
- Suryaman, M. (2020). *Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar*. 13–28.
- Susiani, I. W. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Darur Rohmah Gandu Mlarak Ponorogo. *Proceeding of the 3rd International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, 3, 296–306.
- Usanto, S. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam

Meningkatkan Pemahaman Siswa. *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(2), 494–502.

<https://www.cakrawala.imwi.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/142>

Zed, Mestika. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zulaiha, S., Meldina, T., & Meisin. (2022). Problematika Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 9(2), 163–177.